



**Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Solvabilitas dan Likuiditas
di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan**

Noor Anisyah
Syahrhan
Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Pos-el: nooranisyah89@gmail.com syahrhan@ubt.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i1.608

Abstrak

Pelaporan keuangan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Agama diperlukan sebagai sarana untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Laporan keuangan yang disusun kemudian dianalisis untuk membuktikan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Berdasarkan hal itu, penelitian dibuat untuk mengetahui dan memahami kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan berdasarkan rasio solvabilitas dan likuiditas. Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan didasarkan pada rasio solvabilitas yang diketahui sebesar 0,09 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kuoata meningkat, lalu menurun di tahun 2014 sampai dengan 2017.

Kata Kunci

Rasio solvabilitas, rasio likuiditas, kinerja keuangan

Abstract

Financial reporting from government agencies such as the Ministry of Religion is needed as a means to provide transparency in the use of the budget. Financial statements are prepared and then analyzed to address and accountabilities. Based on that, the research was made to find out and understand the financial performance of the Ministry of Religion of Tarakan City based on solvency and liquidity ratios. The research method used is a descriptive survey. From the results of Key data analysis, the financial performance of the Ministry of Religion of Tarakan City is based on a known solvency ratio of 0.09 in 2012. In 2013 it increased, then decreased from 2014 to 2017.

Keywords

Solvency ratio, liquidity ratio, financial performance

Pendahuluan

Pelaporan keuangan dari instansi pemerintah diperlukan sebagai sarana untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Pelaporan keuangan juga harus kredibel dan akuntabel karena dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaporan, laporan keuangan lembaga/instansi mestinya disusun berdasarkan pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang masih berlaku.

Sebagai pengguna anggaran, Menteri/Kepala Lembaga bertanggung jawab untuk penyusunan kemudian menyampaikan laporan penggunaan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pelaporan keuangan tahunan berhubungan dengan akuntansi sebagai proses pengumpulan, analisis, penyajian, dan interpretasi data keuangan lembaga/perusahaan yang bergerak dalam aktivitas lembaga yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi barang atau jasa.

Dengan adanya pelaporan keuangan pemerintah daerah akan terpanggil untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan terus memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal di setiap daerah. Sesuai regulasi, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan yang diterima agar kinerjanya dapat dievaluasi. Evaluasi kinerja dari organisasi tidak hanya mencakup organisasi orientasi laba tetapi juga organisasi nirlaba. Penilaian kinerja organisasi nirlaba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja organisasi dalam melayani masyarakat.

Pelaporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, Menurut Harahap (2013, n.d), analisis keuangan merupakan upaya untuk menentukan karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan. Analisis angka-angka keuangan utama dilakukan dengan cara membandingkan hasil kinerja dari satu periode yang sudah berjalan ke periode yang selanjutnya, sehingga dapat terlihat adanya peningkatan kinerja atau tidak dari tahun ke tahun. Analisis indikator keuangan banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang berorientasi profit, namun masih jarang digunakan oleh lembaga nonprofit. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai batasan, karakteristik, dan ruang lingkup dalam penyajian laporan keuangan tahunan pemerintah daerah.

Walaupun demikian batasan batasan yang ada di dalam penyajian laporan keuangan sebenarnya dibuat untuk membantu proses analisis laporan keuangan itu sendiri. Apalagi dalam prosesnya nanti akan dilakukan analisis akhir. Meskipun menurut Mahmudi (2010,p. 10), analisis akhir hanya bermakna jika laporan yang dianalisis disajikan dengan cara yang valid dan andal. Laporan keuangan tahunan yang disusun tanpa memerhatikan akuntabilitasnya akan menyebabkan kesalahan dalam penyajian data. Hal ini bisa berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Kesalahan ini juga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang keliru dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan politik.

Oleh sebab itu perlu ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan agar berjalan lancar proses analisis dan evaluasinya. Menurut Mahmudi (2010,p. 88), mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau lembaga menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis varians, analisis indikator keuangan, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediktif. Dalam tulisan ini, penelitian tentang rasio keuangan dilakukan secara terbatas.

Analisis rasio keuangan dapat diartikan sebagai upaya membandingkan dua angka yang datanya telah diambil berdasarkan bagian laporan kas atau debit keuangan tahunan. Analisis indikator keuangan ini dilakukan untuk menafsirkan evolusi organisasi dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan afiliasi lainnya. Analisis aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis utang, analisis saham, analisis profitabilitas, dan analisis investasi adalah contoh analisis indikator dalam laporan keuangan.

Mahmudi (2010.p. 105-106) lebih lanjut menjelaskan bahwa masih kurangnya informasi pendapatan di sektor publik terhadap angka-angka perhitungan keuangan terutama di sektor korporasi yang tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun, masih ada kemungkinan terdapat analisis indikator keuangan yang memungkinkan dapat digunakan seperti di sektor bisnis maupun sektor publik, seperti halnya analisis solvabilitas dan analisis likuiditas.

Selain analisis solvabilitas, ada pula yang disebut dengan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas diartikan sebagai penilaian atas kemampuan suatu organisasi untuk mampu memenuhi seluruh kewajiban dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang (Kasmir, 2012, p.151). Kemudian, kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya dapat diartikan sebagai sebagai solvabilitas. Sedangkan, rasio likuiditas diartikan sebagai keberadaan angka penting yang digunakan untuk menentukan tingkat likuiditas dalam suatu organisasi. Rasio ini dihitung dengan cara membagi total aset lancar dengan perhitungan total kewajiban jangka pendek pada neraca perusahaan. Perkembangan organisasi dari waktu ke waktu dapat dijelaskan dengan rasio lancar. Selain itu, suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Bila selama ini Analisis rasio solvabilitas dan likuiditas lebih sering diterapkan pada perusahaan maka penelitian ini akan menerapkan pada Kementerian Agama di kota Tarakan, Kementerian Agama adalah kementerian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama. Kementerian ini mengemban tugas untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti pelaksanaan petunjuk teknis dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan Kementerian Agama di daerah. Oleh karena itu, Kementerian Agama memiliki kantor wilayah di setiap daerah. Salah satunya adalah kantor Kementerian Agama di wilayah Kalimantan Utara yang membawahi Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan.



Kementerian Agama selaku institusi yang mengusung agama sebagai *core business*-nya di samping harus akuntabel dalam urusan agama juga harus kredibel dalam penggunaan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat Indonesia melalui pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis kinerja keuangan pada kantor Kementerian Agama Kota Tarakan menggunakan rasio solvabilitas dan likuiditas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio solvabilitas dan likuiditas pada kantor Kementerian Agama Kota Tarakan Kalimantan Utara. Penelitian dilakukan di Jalan Lumpuran Kampung Satu Skip, Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Menurut Hermawan (2006,p.168), yang termasuk data sekunder adalah struktur data historis dari variabel-variabel yang dikumpulkan sebelumnya dan disusun oleh pihak lain. Data sekunder terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis data survei yang dikumpulkan:

1. Pengumpulan laporan keuangan dari Kementerian Agama Kota Tarakan:
2. Analisis laporan keuangan Anda dengan menghitung dan menilai rasio keuangan yang terdiri dari:
 - a. Solvabilitas adalah rasio total aset terhadap total kewajiban.
 - b. Likuiditas adalah hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kinerja Keuangan

Kinerja finansial adalah pemeriksaan seberapa baik lembaga yang telah menerapkan aturan-aturan implementasi keuangan, misalnya dengan menyusun laporan pembukuan keuangan yang disesuaikan dengan aturan standar dan ketentuan dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan/atau GAAP (Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum) (Fahmi, 2012, p. 2). Bastian (2006, p. 312) mendefinisikan hal ini sebagai penilaian kinerja dengan mode akuntabilitas yang unsur penilaiannya lebih tinggi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

Hasil data penilaian kinerja dalam penelitian ini dapat digunakan untuk membuat sistem. Adapun untuk pengujian dan tinjauan data dilakukan setelah organisasi mengumpulkan semua data untuk menentukan praktik yang memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu dilakukan pula evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah cara untuk menentukan apakah program dan operasi perusahaan efektif. Menurut Mulyadi (2014, p.416) bahwa penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala menentukan efektivitas dari operasional suatu organisasi, bagian dari struktur organisasi, dan keberadaan karyawannya berdasarkan tujuan, kriteria, dan kriteria yang ditentukan.

Munawir (2010, p. 31) menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya penilaian kinerja dari suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tingkat likuiditas ataupun kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara langsung;
2. Pengetahuan tentang solvabilitas dari suatu perusahaan, begitu juga kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam menyelesaikan kewajiban keuangan dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang;
3. Mengetahui tingkat profitabilitas, begitu juga kemampuan perusahaan untuk mampu menghasilkan keuntungan sampai dengan periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan ini dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan keberhasilan suatu lembaga atau institusi berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilakukan, sehingga tolak ukur kinerja keuangan dilakukan berdasarkan rasio keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi. Menurut Fahmi (2012,p. 45), analisis angka-angka keuangan utama dimulai dengan menyusun laporan keuangan dasar: berupa neraca, laporan hasil aktivitas (laba rugi), dan laporan transaksi kas keuangan.

Perhitungan rasio keuangan antara lain didasarkan pada pola sejarah terbentuknya perusahaan yang diperoleh dari perhitungan selama bertahun-tahun untuk mengetahui progress suatu perusahaan dengan penilaian

membaik ataukah memburuk, atau dengan cara membandingkan dengan keberadaan perusahaan lain dalam hasil industry (barang dan jasa) yang sama secara lebih jelas. Sedangkan analisis rasio menurut Harahap (2013, p. 297) adalah hubungan matematis antara dua jumlah atau hubungan statistik yang menunjukkan perbedaan antara dua item baik pada neraca maupun laporan laba rugi.

Rasio keuangan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau frekuensi yang pembilangnya dibandingkan dengan penyebutnya. Selain itu, terdapat pula indikator di dalam pengelolaan keuangan. Jenis indikator pengelolaan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan adalah indikator likuiditas, indikator solvabilitas, indikator aktivitas, dan indikator profitabilitas. Adapun fokus penelitian ini adalah pada masalah rasio solvabilitas dan rasio likuiditas.

Rasio Solvabilitas

Analisis kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan salah satunya menggunakan rasio solvabilitas. Menurut Harahap (2013, p. 306), rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan ukuran penting seberapa baik suatu perusahaan mampu atau didanai oleh pihak luar, seperti yang digambarkan oleh ekuitas. Ketika sebuah perusahaan menggunakan *leverage*, maka dapat memengaruhi rasio dan pengembalian. Penggunaan rasio ini bisa digunakan untuk mengetahui sebesar apa kemungkinan resiko keuangan perusahaan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Harahap. Menurut Sugiyarso (2011, p.104), rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi seluruh tanggungan hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Hanafi dan Halim (2012, p. 75) juga mengartikan rasio solvabilitas sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pendapat ini diperkuat oleh Reeve et.al (2014, p. 174) mendeskripsikan solvabilitas menggunakan hutang untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Begitupun Fred Weston dalam Kasmir (2012, p. 151) mengartikan rasio solvabilitas adalah metrik yang dapat digunakan untuk menghitung asset yang dimiliki perusahaan yang mampu dicover oleh pinjaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam upaya memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya, terutama dalam hal terjadi pembubaran (likuidasi) suatu perusahaan.

Rasio aset bersih terhadap total kewajiban digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas. Standar ini mengharuskan masyarakat untuk mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio total aset terhadap total kewajiban adalah rasio solvabilitas yang menghitung jumlah jaminan bagi kreditur jangka panjang. Angka kunci ini mewakili kesediaan perusahaan untuk mengimbangi semua kewajibannya dengan asetnya (Sugiyarso, 2011, p. 104).

Beberapa rasio yang mengukur rasio solvabilitas, yaitu:

1. Debt To Equity Ratio

Menurut Kasmir (2012:157), hal ini diartikan sebagai rasio penilaian utang terhadap modal. Derajat hutang ditentukan dengan membagi semua hutang dengan total modal. Rasio ini membantu menentukan nilai setiap rupiah ekuitas yang digunakan sebagai jaminan utang. Menurut Sugiyarso (2011, p. 105), rasio utang terhadap ekuitas sekarang menjadi rasio modal ekuitas terhadap total utang. Metrik ini menunjukkan kemampuan ekuitas untuk menutupi semua kewajiban.

Debt Equity Ratio mewakili kemampuan ekuitas pemilik untuk menyelesaikan hutang kepada pihak eksternal dan rasio yang dapat mengukur keuangan hutang perusahaan. Rasio solvabilitas juga dapat mengukur struktur modal suatu perusahaan. Struktur modal diartikan sebagai pembiayaan yang sifatnya permanen dan terdiri dari hutang jangka panjang, saham *preferen*, dan ekuitas para pemegang saham (Weston & Copeland, 2010, n.d.). Oleh karena itu, rasio *leverage* adalah perbandingan total kewajiban (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang) dan modal, dan mampu menjabarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan modal yang masih tersedia. Rumus perhitungan *Debt Equity Ratio* sebagai berikut.



$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

2. *Debt to Asset Ratio*

Menurut Kasmir (2012, p. 156), rasio utang merupakan angka penting untuk menentukan rasio total utang terhadap seluruh neraca. Sedangkan, menurut Martono dan Harjito (2005, p. 59), rasio kewajiban terhadap aktiva adalah perbandingan jumlah kewajiban terhadap total aktiva. Apabila rasio utang terhadap aset meningkat tetapi total neraca tidak berubah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan lebih tinggi. Rasio kewajiban terhadap aset yang tinggi menunjukkan berapa rasio yang belum dibayar perusahaan. Rasio utang mengukur aset *leverage* perusahaan. Rumus *Debt to Asset Ratio*:

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Rasio Likuiditas

Rasio kedua yang dilihat dalam analisis kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan adalah rasio likuiditas. Menurut Hery (2012, p. 149), ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pertama, perusahaan tidak punya uang sama sekali. Kedua, perusahaan tidak dalam kesulitan keuangan, tetapi terlilit hutang dan perlu menjual modal kerja secara tunai, seperti: penagihan hutang, penjualan persediaan, dan penjualan surat berharga.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Hery. Riyanto (2008, p. 25) menyatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mampu memenuhi semua kewajiban keuangan yang sifatnya harus segera dipenuhi. Ini disebut perusahaan tidak likuid tanpa uang tunai. Sugiyarso (2011:103) menyatakan bahwa *current ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tolok ukur rasio likuiditas didasarkan pada:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Menurut Kasmir (2012, p.134), rasio lancar diartikan sebagai angka penting untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek atau hutang yang segera terutang di seluruh rekeningnya. Dari hasil pengukuran rasio, jika rasio kecil maka dapat dikatakan tidak mencukupi modal untuk pelunasan utang. Namun, jika hasil pengukuran tinggi, kondisi perusahaan tidak selalu baik. Hal ini dapat terjadi karena uang tunai tidak digunakan secara optimal. Menurut Sugiyarso (2011, p.104), rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Indikator ini mampu menunjukkan kemampuan aktiva lancar untuk menutupi utang jangka pendek.

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

2. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Menurut Sugiyarso (2011, p. :104), *quick ratio* diartikan sebagai perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Kemampuan aset lancar untuk mengimbangi kewajiban jangka pendek diwakili oleh angka kunci ini. Rasio cepat didefinisikan Martono dan Harjito (2005, p. 55) sebagai perbedaan antara total aset lancar dikurangi persediaan dan total kewajiban lancar. Aset lancar sendiri meliputi kas, setara kas, dan piutang yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas. Umumnya, rasio cepat suatu perusahaan harus lebih besar dari 1. Rasio kurang dari 1 berarti utang jangka pendek tidak dapat ditutupi dengan uang tunai atau aset jangka pendek lainnya. Sedangkan, Menurut Moeljadi (2006, p.69) persediaan adalah aset yang paling tidak likuid, dan ketika perusahaan dilikuidasi, persediaan adalah aset yang paling merugikan. Ditambahkan oleh Fraser dan Ormiston (2004: 207) bahwa indikator ini berfokus terutama pada aset jangka pendek yang lebih likuid

seperti uang tunai, surat berharga yang dapat diperdagangkan, piutang dan hubungan dengan berbagai obligasi jangka pendek.

Tingkat persediaan adalah aset yang paling tidak likuid dan nilainya hampir tidak pasti. Penggunaan *quick ratio* dapat dijadikan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen jangka pendeknya. Tidak ada aturan tunggal yang mengatur rasio cepat untuk sebuah perusahaan. Menurut Syamsuddin (2011: 46), rasio cepat 1,00 umumnya dianggap baik. Jika sulit untuk menjual persediaan dengan cepat tanpa depresiasi, rasio ini dapat memberikan gambaran likuiditas yang lebih akurat. Rumus Rasio Cepat (*Quick Ratio*) :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

Tabel 1
 Hasil Perhitungan *Debt to Asset Ratio* Tahun 2012-2017

Tahun	Total Hutang	Total Aset	DR
2012	Rp 2.616.000	Rp 2.945.922.024	0,09
2013	Rp 86.616.000	Rp 2.975.463.979	2,91
2014	Rp 21.200.000	Rp 2.949.938.455	0,72
2015	Rp 21.000.000	Rp 3.396.475.540	0,62
2016	Rp 21.600.000	Rp 1.809.640.956	1,19
2017	Rp 21.000.000	Rp 5.354.855.399	0,39

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai rasio solvabilitas yang tercermin dari *debt asset ratio* Kementerian Agama Kota Tarakan tertinggi sebesar 2,91 pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2012. 0,09. Rasio rata-rata kewajiban terhadap aset adalah 0,99, yang mendekati 1. Hal itu menunjukkan rasio kredit atau utang rata-rata yang rendah dibandingkan dengan aset Kementerian Agama Kota Tarakan.

Rasio ini menunjukkan seberapa baik kewajiban dapat ditutupi oleh aset. Semakin rendah rasio kewajiban terhadap aset, semakin aman dana tersebut. Rasio ini dihitung berdasarkan total utang Kementerian Agama Kota Tarakan terhadap total aset. Jumlah kewajiban ini merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai beban yang harus dibayar dan diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Utang pihak ketiga dengan Kementerian Agama Kota Tarakan terdiri dari biaya kegiatan yang belum dibayar, gaji yang belum dibayar, dan biaya barang yang belum ditagih.

Total utang Kementerian Agama Kota Tarakan kepada pihak ketiga pada tahun 2012 sebesar Rp 2.616.000 dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 86.616.000. Masih ada keluhan yang diselesaikan tahun sebelumnya. Sebagian besar utang itu untuk pembayaran Tunjangan Kejuruan Guru (TPG) pada Kementerian Agama di Kota Tarakan. TPG diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan guru berstatus non-PNS yang memenuhi persyaratan penerbitan TPG.

Penelitian yang dilakukan Yrudani (2015) pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Rokan pada tahun 2012 - 2014 menyimpulkan bahwa *Total Debt Ratio* perusahaan baik. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Sementara itu, rasio perputaran total aset perseroan yang berada di bawah rata-rata industri, berimplikasi pada kurang mampu menggunakan total aset untuk mendongkrak pendapatan. Setelah itu, rasio perputaran persediaan perusahaan menunjukkan bahwa keluaran keuangan perusahaan berada di bawah rata-rata, yang berarti perusahaan cenderung tidak memaksimalkan pendapatan dengan menggunakan persediaan yang ada. Hal inilah yang menurut Natalia et al. (2012), disebut rasio solvabilitas, yaitu terjadinya penurunan rasio total kewajiban terhadap total aset, karena perusahaan dapat menutupi kewajibannya dengan berbagai aset. Ini adalah efisiensi perusahaan yang baik. Rasio total utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan bahwa bisnis berjalan dengan baik, dengan lebih sedikit utang dan lebih sedikit risiko keuangan setiap tahun.



Penelitian rasio solvabilitas seperti ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian Septiana (2015) pada PT Mayora Indah Tbk menghitung rasio solvabilitas berdasarkan *total debt to equity ratio*, *total debt to total capital assets*, *long term debt to equity ratio* dan *tangible assets debt coverage*. Berdasarkan perhitungannya dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2012 – 2014 diketahui kondisi keuangan PT. Mayora Indah Tbk dalam kondisi baik. Sebagai upaya meningkatkan rasio solvabilitas, perusahaan akan mengurangi jumlah liabilitasnya yang berupa liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian lebih meningkatkan aset perusahaan supaya perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan atau sering disebut dengan kesulitan dalam membayar liabilitasnya.

Selain Septiana, ada pula penelitian Ferdiansyah (2013) yang menunjukkan total rasio solvabilitas PT. Madu Baru mencapai 152,68% pada 2010 yang berarti setiap Rp. 1.00 jaminan hutang sebesar Rp. 1.5268 aset perusahaan, pada tahun 2011 sebesar 147,87 persen yang berarti setiap Rp. 1,00 hutang dijamin dengan Rp. 1.4787 aset perusahaan, pada tahun 2012 sebesar 135,40 persen yang berarti setiap Rp. 1,00 hutang dijamin dengan Rp. 1.3540 aset perusahaan. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa total aset perusahaan disebut *solvable*, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, namun dalam jangka panjang harus tetap karena setiap tahun mengalami penurunan.

Tabel 2

Analisis Rasio Likuiditas Kementerian Agama Kota Tarakan
Hasil Perhitungan *Current Ratio* Tahun 2012-2017

Tahun	Aset Lancar		Hutang Lancar		CR
2012	Rp	12.458.045	Rp	2.616.000	4,76
2013	Rp	42.000.000	Rp	86.616.000	0,48
2014	Rp	13.586.240	Rp	21.200.000	0,64
2015	Rp	15.119.400	Rp	21.000.000	0,72
2016	Rp	18.018.450	Rp	21.600.000	0,83
2017	Rp	33.243.710	Rp	21.000.000	1,58

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai *current ratio* yang tercermin pada Kementerian Agama Kota Tarakan tertinggi sebesar 4,76 pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,48. Rasio lancar rata-rata adalah 1,50. Hal ini menunjukkan tingginya solvabilitas tugas Kementerian Agama kota Tarakan yang akan segera berakhir.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Kementerian Agama Kota Tarakan dalam memenuhi janji jangka pendeknya. Kementerian Agama Kota Tarakan sudah menyiapkan anggaran kas, namun perlu dukungan melalui analisis *current ratio*. Rasio likuiditas diukur berdasarkan *quick ratio*, yaitu dengan membandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek. Berdasarkan Tabel 2 nilai *current ratio* pada tahun 2012 sebesar 4,76 kali, yang berarti seluruh kewajiban lancar sebesar 1 rupiah Kementerian Agama Kota Tarakan akan dijamin oleh aset lancar Rp 4,76, tetapi kewajiban lancar Kementerian Agama Tarakan melebihi total aset lancar, sehingga terjadi penurunan selama beberapa tahun ke depan.

Hal ini juga terjadi pada penelitian Pratama dan Wiksuana (2016), yang membuktikan bahwa rasio lancar (CR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Selain itu, Wiguna (2015) telah menunjukkan dalam sebuah penelitian bahwa likuiditas parsial yang diukur dengan rasio lancar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan laba sebelum pajak. Yrudani (2015) telah menghitung rasio lancar PT Perkebunan Nusantara V PKS Sei Rokan dikatakan kurang baik karena tidak dapat melunasi utang jangka pendek atau utang pada saat penagihan. Natalia et al. (2012) dari hasil survei sampai pada kesimpulan bahwa kenaikan *current ratio* berfungsi dengan baik karena dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kewajiban lancar.

Ada pula penelitian Ferdiansyah (2013) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Madu Baru ditinjau dari likuiditas pada rasio lancar pada 2010 adalah 96,39%. Artinya untuk setiap utang jangka pendek

sebesar Rp1,00 dijamin aset likuid perusahaan sebesar Rp0,9639. Pada tahun 2011, rasio lancar (CR) turun menjadi 90,24%. Artinya, untuk setiap utang jangka pendek sebesar Rp1,00, dijamin Rp0,9024 aset lancar perusahaan. CR turun 6,15% dibandingkan CR 2010 karena peningkatan kewajiban lancar perusahaan melebihi aset lancar perusahaan.

Selain itu, CR meningkat menjadi 110,84% pada tahun 2012. Artinya, untuk setiap utang jangka pendek sebesar Rp1,00, dijamin Rp1,1084 aset lancar perusahaan. Artinya CR meningkat 20,60% dari tahun karena aktiva lancar lebih tinggi dari kewajiban lancar perusahaan. Dengan cara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa CR perusahaan dalam kondisi buruk karena CR perusahaan dapat berfluktuasi dan kewajiban jangka pendek yang dijamin oleh aset lancar perusahaan tidak dapat dipenuhi pada tahun tertentu. Penelitian Sariningsih (2012) tentang analisis kinerja keuangan indikator likuiditas tahun 2009, 2010 dan 2011 tampak mengalami penurunan atau fluktuatif dan memberikan hasil yang sama.

Pembahasan

Total aset Kementerian Agama Kota Tarakan dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar meliputi kas yang ada di bendahara pengeluaran dan penerimaan, piutang, tagihan penjualan angsuran. Namun aset lancar yang ada di Kementerian Agama Kota Tarakan hanya berasal dari persediaan. Persediaan adalah aset jangka pendek berupa barang atau peralatan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau dipasok sebagai pelayanan kepada masyarakat. Aktiva tetap berupa tanah, gedung, gedung, peralatan, dan mesin dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Berdasarkan Tabel 1, total neraca terbesar untuk tahun 2017 adalah Rp.5.354.85.399, dan total neraca terkecil pada tahun 2016 adalah Rp.1.809.640.956, yang merupakan peningkatan 195,91%. Namun pada tahun sebelumnya terjadi penurunan total aset sebesar 31,34% dari pada tahun 2015 adalah Rp.2.635.485.210. Dari tahun 2012 hingga 2015, total kekayaan Kementerian Agama di Tarakan terus menurun, namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 34,82% atau Rp.2.635.485.210, sedangkan total hutang terbesar terjadi di tahun 2013 yaitu Rp. 86.615.000 dan hutang terendah di tahun 2012 yaitu Rp. 2.616.000. Terlihat jelas bahwa tingkat keamanan dana di Kementerian Agama Kota Tarakan masuk kategori baik.

Besarnya *Debt to Asset Ratio* tahun 2012 adalah 0,09. Persentase tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seluruh aktiva tetap Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan didanai oleh hutang pihak lain sebesar 0,09 %. Kemudian pada tahun 2013 nilai rasio mengalami peningkatan menjadi 2,91 %, ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan kurang mampu memanfaatkan setiap aktiva yang dimilikinya untuk menjamin dan melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2014 dan 2015, meningkat lagi di tahun 2016 dan turun lagi di tahun 2017. Berdasarkan perhitungan *Debt to Asset Ratio* di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rasio yang rendah menunjukkan penurunan dari resiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya.

Menurut hasil analisis *current ratio* 2012, menunjukkan kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan saat ini lebih dari 1,0 kali secara finansial, dan memiliki solvabilitas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Ini karena bagian aset lebih besar daripada bagian kewajiban. Pada 2017, akan mampu membayar utang 1,58 kali. Namun kemampuan membayar utang masih dipertanyakan dan dinyatakan tidak sehat, karena saat ini alokasi yang dipegang Kementerian Agama Kota Tarakan antara tahun 2013 hingga 2016 kurang dari 1,0 kali.

Berdasarkan hasil analisis rasio lancar untuk periode 2012-2017 di atas, kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan terlihat berada di atas standar yang ditetapkan. Rasio lancar yang baik biasanya melebihi 1 kali karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset jangka pendek daripada hutang jangka pendek. Semakin tinggi angka rasio, semakin akurat dapat memprediksi likuiditas. Namun yang terjadi di Kementerian Agama Tarakan dalam kondisi baik pada tahun 2012 dan 2017. Pasalnya, pada tahun tersebut utang Kementerian Agama Kota Tarakan lebih kecil dari aset lancarnya. Dengan demikian, aset Kemenag Tarakan cukup cair untuk melunasi utang jangka pendek. Dari tahun 2013 hingga 2016, likuiditas berada di bawah 1,0, yang berarti likuiditas buruk.



Simpulan

Kinerja keuangan Kementerian Agama Tarakan berdasarkan rasio solvabilitas diketahui memiliki rasio utang terhadap aset 2012 sebesar 0,09. Artinya, 0,09% dari total aset tetap Kementerian Agama Tarakan ditutupi utang. Kemudian, pada 2013 rasio meningkat menjadi 2,91%. Hal ini menunjukkan bahwa semua aset yang harus dijamin oleh Kementerian Agama Kota Tarakan tidak dapat digunakan dan utang yang belum dibayar tidak dapat dilunasi. Lalu menurun pada tahun 2014 dan 2015 dan meningkat lagi pada tahun 2016, kemudian menurun lagi pada tahun 2017. Berdasarkan perhitungan rasio *leverage* di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai rasio, semakin rendah risiko bahwa perusahaan akan gagal memenuhi semua kewajibannya.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Kementerian Agama Kota Tarakan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kementerian Agama Kota Tarakan telah membuat anggaran kas, yang perlu didukung dengan analisis likuiditas. Pada tahun 2012, rasio lancar adalah 4,76 kali, berarti utang jangka pendek yang dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp4,76 adalah Rp1. Selain itu, total aset lancar melebihi total aset likuid sehingga terjadi penurunan dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, *current ratio* tahun 2012 menunjukkan *current ratio* melebihi 1,0 kali, dan dapat memenuhi kewajibannya secara penuh. Pada 2017 mampu membayar utang 1,58 kali. Namun, kemampuan kota Tarakan untuk melunasi utangnya masih dipertanyakan, karena saat ini alokasi yang dipegang Kementerian Agama dari tahun 2013 hingga 2016 kurang dari 1,0 kali.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa hal yang menurut peneliti dapat ditingkatkan terkait kinerja keuangan Kementerian Agama Kota Tarakan:

1. Rasio solvabilitas yang rendah perlu ditingkatkan dengan mengelola total utang jangka pendek dan jangka panjang agar aset yang dimiliki dapat menutupi seluruh utang;
2. Dalam rangka meningkatkan rasio solvabilitas, perlu mengurangi baik utang jangka pendek maupun jangka panjang dan lebih meningkatkan jumlah aset agar pembayarannya atas kewajibannya tidak mengalami kesulitan;
3. Rasio kewajiban lancar Kementerian Agama Tarakan 2013-2016 dilaporkan buruk karena utang jangka pendek perusahaan lebih tinggi daripada aset jangka pendeknya. Sebaiknya memprioritaskan pengelolaan modal kerja daripada menggunakan utang jangka pendek. Untuk meningkatkan likuiditas, perlu untuk mengurangi dan mengurangi utang jangka pendek dan lebih meningkatkan modal kerja.

Daftar Rujukan

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen kinerja: Teori dan aplikasi*. Alfabeta.
- Fraser, M. L., & Ormiston, A. (2004). *Memahami laporan keuangan* (Edisi Ketu). Penerbit Indeks.
- Hanafi, S., & Halim, A. (n.d.). *Manajemen keuangan (Dasar-dasar pembelanjaan)*. BPFE.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis kritis atas laporan keuangan* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Hermawan, A. (2006). *Metode penelitian*. Gramedia Widia Sarana.
- Hery. (2012). *Analisis kinerja manajemen: The best financial analysis, menilai kinerja manajemen berdasarkan rasio keuangan*. Gramedia Widiasarana.
- Kasmir. (2012). *Analisis laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Katili, A. Y. (2018). Mekanisme pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) pegawai di sekretariat DPRD provinsi gorontalo. *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, Budaya*, 4(3), 282–292.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.
- Martono, & Harjito, A. (2005). *Manajemen keuangan*. Ekonisia.
- Moeljadi. (2006). *Manajemen keuangan: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif* (Edisi Kesa). Bayumedia Publishing.
- Munawir, S. (2010). *Analisa laporan keuangan* (Edisi Keem). Liberty.
- Natalia, D., Samben, R., & Musviyanti. (2012). Analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. KUD Kopta Unit Tambang di Samarinda. pp 1-17. *Jurnal Penelitian*, 0(0), 1–17.

- Pratama, I., & Wiksuana, I. G. B. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2), 1338–1367.
- Riyanto, B. (2008). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. Penerbit BPFE.
- Sariningsih, D. (2012). Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada CV. Lembu Mada Nusantara di Samarinda. *Jurnal Penelitian*, 0(0), 1–26.
- Septiana, T. (2015). Analisis rasio solvabilitas terhadap laporan keuangan untuk menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan (Studi Kasus PT. Mayora Indah, Tbk yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Penelitian*, 0(0), 1–15.
- Sugiyarso, G. (2011). *Manajemen keuangan* (Cetakan ke). Media Persindo.
- Syamsudin, L. (2011). *Manajemen keuangan perusahaan*. Raja Grafindo Persada.
- Warren, R., E. D., Suhardianto, K., & Jusuf, D. D. (2014). *Pengantar akuntansi*. Salemba Empat.
- Weston, F. J., & Thomas, E. C. (2010). *Manajemen keuangan jilid 2*. Binarupa Aksara Publisher.
- Wiguna, R. T. (2015). *Pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi kasus pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013)*. Widyatama University.
- Yrudani. (2015). Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei Rokan. *Jurnal Penelitian*, 0(0), 1–8.